

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN SINJAI
SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Makassar Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*

HASRUDDIN

1594042003

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2019/2020

ABSTRAK

Hasruddin, 2019. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai tahun 2014 sampai dengan 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang diperoleh besaran kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu: kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 15,43% tahun 2015 sebesar 17,83% tahun 2016 sebesar 21,49% tahun 2017 sebesar 21,87%, dan pada tahun 2018 sebesar 23,09%. Dan pada tiap tahunnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan.

BSTRACT

Hasruddin, 2019. The Contribution of Regional Tax Revenues to Regional Original Revenues in Sinjai Regency.

This study aims to determine the effect of Local Tax Revenues on Local Revenue in Sinjai Regency.

This study aims to determine how much the contribution of local taxes on local original income in Sinjai district from 2014 to 2018. The research method used in this study is qualitative. The results of this study indicate that the amount of local tax contribution to regional own-source revenue, namely: the contribution of regional tax to regional own-source revenue in 2014 amounted to 15.43% in 2015 amounted to 17.83% in 2016 amounted to 21.49% in 2017 amounted to 21, 87%, and in 2018 of 23.09%. And each year the contribution of local taxes to local revenue continues to increase.

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Reformasi membawa kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia. Reformasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebut kebijakan Otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang telah membawa banyak perubahan bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai mana kita ketahui pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ini disebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada masing-masing daerah. Otonomi daerah tidak hanya berdampak terhadap penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semata, tapi juga penyerahan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan.

Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan regulasi ini, berdampak pada sumber pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan yang sah

Koswara (2000: 50), menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu daerah dengan segala kemampuannya harus dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Jenis pajak tersebut antara lain:

- a. Pajak hotel

- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Sebagai mana kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Pajak daerah inilah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pajak daerah ini juga berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena telah diketahui bahwa sebagian besar pendapatan negara kita adalah berasal dari pajak. Oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Peristiwa yang terjadi sejak otonomi daerah telah membawa perubahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana dalam setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, oleh karena itu setiap daerah berusaha menggali potensi keuangannya melalui pendapatan asli daerah guna membiayai pemerintah daerah dan membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan daerah seharusnya memiliki peranan yang besar dalam pendapatan asli daerah.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan juga telah dilakukan, tetapi terdapat hasil dalam penelitian tersebut. Sembiring (2011) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan, Ulfa (2007) menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Marpaung (2009) menunjukkan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan, putranty (2008) menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Arsy (2013) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan, Christine (2015) menunjukkan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Helvianti (2009) menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan, Oktoriani (2013) menunjukkan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dari uraian diatas, hasil penelitian yang belum menunjukkan konsistensi antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya, baik karena perbedaan lokasi maupun periode waktu yang diteliti mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pajak daerah sebagai variabel independen yang diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat. Peneliti mengambil Kabupaten Sinjai sebagai objek penelitian karena kabupaten sinjai merupakan salah satu kabupaten yang ada pada provinsi sulawesi selatan. Keistimewaan kabupaten sinjai dengan alamnya, mampu ditangkap oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini ditandai dengan mulai banyaknya hotel/penginapan, restoran/warkop, dan tempat hiburan yang dibangun dan juga mulai memadainya penerangan jalan di Kabupaten Sinjai ini. Seiring dengan perkembangan di Kabupaten sinjai akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan dihimpun melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul:
“ Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sinjai”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai?
2. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai?
3. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai?
4. Apakah penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai?
5. Apakah penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan penerangan jalan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel/penginapan, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam memahami pengelolaan penerimaan pajak, khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan
2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Sinjai menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk menjadikan bahan pembelajaran serta informasi dan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk melanjutkan pengembangan penelitian terkait permasalahan yang sama
4. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam mendalami masalah pengelolaan pajak

BAB II **Tinjauan Pustaka**

A. Tujuan Teori

- 1. Pengertian Pajak**
 - a. Defenisi Pajak**

Menurut Soemitro yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan tegas dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan pajak tidak lagi dinyatakan sekedar sebagai pungutan atau iuran yang bersifat memaksa, sebagai mana banyak dikemukakan oleh para ahli. Pajak dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di tempatkan sebagai kontribusi wajib kepada Negara (Indonesia) oleh Warga Negara dan penduduk yang memiliki kepentingan dengan Indonesia. Dengan kata kontribusi wajib berarti si pembayar pajak turut serta dalam membiayai pengeluaran pemerintah/Negara yang dimaksud untuk mensejahterahkan masyarakat. Kontribusi tersebut bersifat memaksa, artinya semua orang diminta untuk berperan serta dengan membayar pajak sepanjang ia memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perpajakan. Apabila ia melakukan kewajiban tersebut maka kepadanya akan dilakukan upaya paksa, baik pengenaan sanksi perpajakan maupun penagihan pajak secara paksa.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut dalam bentuk uang, bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan, atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi pengaturan (regular). Penjelasan kedua fungsi pajak ini akan diuraikan secara berturut-turut sebagai berikut.

a. Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak mulai penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Sistem pemungutan pajak

Mardiasmo menyatakan bahwa tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

a. Official Assesment System

Official assesment system adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

b. Self Assesment System

Self asseesmen system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang

c. With Holding System

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

d. Pengklasifikasian Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya

a. Menurut golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dikumpul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau di bebaskan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut sifat

Menurut sifat pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

2. Pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya yang memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk rumat tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.

2 Pajak Daerah

a. Defenisi Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1:

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mustaqiem (2008). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Pembagian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2, pajakdaerah terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Pajak Provinsi

a. Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli atauu tukar menukar.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak air permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak hotel

Pajak hotel adaalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel

b. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran

c. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan

d. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

e. Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

g. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

h. Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah

i. Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan burung walet

j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutangan dan pertambangan

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan

3. Pajak Hotel, Pajak Relame dan Pajak Penerangan Jalan

1. Pajak Hotel

a. Defenisi Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang samakecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

1. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek, termasuk gubuk parawisata (cottage) motel, wisma parawisata, pasanggrahan (hotel), losmen, bungalow dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan termasuk telepon, faksimil, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum termasuk pusat kebugaran (fitnes center), kolam renang, tenis, karaoke yang disediakan atau dikelola oleh hotel
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

c. Pengecualian Objek Pajak Hotel

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
3. Fasilitas olahraga hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan untuk tamu hotel dengan pembayaran
4. Pertokoan, perkantoran, perbangkan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

d. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

e. Tarif Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut berdasarkan daerah hotel berlokasi.

2. Pajak Restoran

a. Definisi Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/katering.

b. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain

c. Pengecualian Objek Pajak Restoran

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu:

1. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan peraturan daerah misalnya saja tidak melebihi Rp30.000,000,00 per tahun

d. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran

e. Tarif Dasar Pengenaan dan Penghitungan Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak

3. Pajak Hiburan

a. Definisi Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

b. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagai mana dimaksud adalah:

1. Tontonan film
2. Pengelaran kesenian, musik, tari dan busana
3. Konteks kecantikan binaraga dan sejenisnya
4. Pameran
5. Karaoke
6. Sirkus, akrobat dan sulap
7. Permainan bilyar, golf dan bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijak, refleksi, mandi uap/spa pusat kebugaran (fitnes center)
10. Pertandingan olahraga

c. Pengecualian Objek Pajak Hiburan

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan

d. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

e. Tarif Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran, busana, konteks kecantikan, karaoke, permainan ketangkasan, panti pijat dan uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 10%. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dari tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

4. Pajak Penerangan Jalan

a. Definisi Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan lain yang rekeningnya di bayar oleh pemerintah daerah.

b. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya di bayar oleh pemerintah daerah

c. Pengecualian Objek Pajak Penerangan Jalan

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
3. Penggunaan tenaga listrik berasal bukan dari perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait

4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang di atur dengan Peraturan Daerah

d. Subjek Pajak Penerangan Jalan dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak penerangan jalan yaitu pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan yaitun orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan penggunaan tenaga listrik

e. Tarif Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Tarif penerangan jalan paling tinggi yaitu sebesar 10% yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

Perhitugan pajak penerangan jalan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Jika penerangan jalan terutang di pungut oleh PLN, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang di bayarkan oleh pelanggan PLN. Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan listrik.

3. Pendapatan Asli Daerah

1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ‘pendapatan asli daerah yang di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya di setiap daerah karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBN maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

2. Konsep Pendapatan Daeah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian PAD menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya di setiap daerah karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dalam pasal 6 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain- lai pendapatan asli daerah yang sah.

3. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dijelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari

- 1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel
- 2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran
- 3) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
- 4) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- 5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah sesuai dengan kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung . menurut Suparmoko (2002) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) retribusi daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat diamati oleh orang pribadi. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari : (UU Nomor 18 Tahun 1997)
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan

- b. Retribusi pelayanan persampahan/kenersihan
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Retribusi pelayanan pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi pengganti biaya cetak peta
 - j. Retribusi pengujian kapal perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelanggan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat khusus parkir
 - f. Retribusi tempat penginapan /villa
 - g. Retribusi penyedotan kakus
 - h. Retribusi rumah potong hewan
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair
 - l. Retribusi penjualan produksi limbah cair
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, yaitu bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan perusahaan daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan pemerintah dan penerimaan yang sah menurut Undang-undang secara umum upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi dan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas Bisnis Penerimaan

Tindakan yang harus dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kepastian penerimaan dari setiap jenis pungutan.

- b. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan pada, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM

- c. Meningkatkan Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berskala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap pemungut pajak dan saksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah

- d. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah

Jenis-jenis lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 mencakup:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas kelambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan eksekusi atas jaminan

11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan

Selanjutnya Sedarmayanti (2002) juga dapat dilakukan ekstensifikasi perpajakan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 19, 20, 21, dan 23 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

- a. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dana bagi hasil terdiri dari : bagi hasil pajak yang meliputi bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- b. Bagi hasil sumber daya alam yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam dan panas bumi
- c. Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
- d. Dana alokasi khusus (DAK) selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu menandai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.

f. keuangan daerah

keuangan daerah adalah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna. Keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsteresasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah terutama masyarakat tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah

Parameter keberhasilan perkembangan daerah terefleksikan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah

Untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar aturannya adalah undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dalam uraian sumber-sumber keuangan daerah berbeda dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang sebelumnya diganti

Menurut para ahli keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Menurut Mamesa (1995) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan PAD

Pemahaman terhadap suatu penelitian harus didasarkan atas suatu kerangka kerja ini merupakan variabel yang memainkan peranan penting dalam memperlancar terwujudnya keberhasilan organisasi. Kerangka kerja yang dipakai dapat mengidentifikasi rangkaian variabel yang berhubungan dengan penyumbang proses pengelolaan yakni planning, organizin, actuating, kontroling.

a. Planning.

Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mengidentifikasi tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan jadi perencanaan itu adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta program-program, yang dilakukan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau secara formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa manfaat perencanaan yaitu

1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan
2. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas
3. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat
4. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi
5. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai organisasi
6. Membuat tujuan lebih khusus terperinci dan lebih mudah dipahami
7. Meminimumkan pekerjaan yang belum pasti
8. Menghemat waktu, usaha, dan dan

b. Organizin

Istilah pengorganisasian berasal dari kata organisme yang merupakan sebuah eitis dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh istilah ini diartikan sebagai

tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut.

c. Actuating

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan actuating merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Dari pengertian di atas pelaksanaan actuating tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan actuating adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika.

1. Merasa yakin akan mampu mengerjakan
2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya
3. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting
4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan
5. Hubungan antara teman dalam organisasi tersebut harmonis

d. Kontroling

Controling atau pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Kontroling dan pengawasan sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tujuan yang telah digariskan semula.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang

telah direncanakan secara efektif dan efisien, bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berhasil erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana aktifitas yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, menurut Mardiasmo (2002) antara lain:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan fiscal gap.
2. Kualitas layanan publik yang masih memperhatingkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat di jual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum
4. Berkurangnya dana bantuan dari pemerintah pusat (Dana alokasi Umum dari pusat yang tidak mencakupi)
5. Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total pendapatan asli daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah.

Kontribusi menurut arti dalam kamus ilmiah adalah sumbangan. Jadi pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Permasalahan secara umumnya dalam kegiatan penggalan sumber-sumber pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Tidak signifikannya peran Pendapatan Asli Daerah dalam anggaran daerah tidak lepas dari "system tax assignment" di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten sinjai tentang pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan asli daerah yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah

- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menggantikan undang-undang nomor 34 tahun 2000
 - 4) Peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2001 tentang pajak daerah
 - 5) Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah
- Adapun rasio-rasio tentang kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

1. Rasio Kontribusi

Kontribusi adalah suatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi komponen pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) terhadap PAD adalah sumbangan yang diberikan komponen-komponen tersebut terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah kota tertentu.

Menurut Arief Himmawan dan Djoko Wahyudi analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD). Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Juga disebutkan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio yang diperoleh dari suatu jenis pungutan maka semakin efektif kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan terhadap hasil yang diperoleh.

Mahmudi beliau menjelaskan bahwa rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan pada tabel di bawah ini .

Tabel 1.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Nama peneliti	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
Helvianti (2009)	Variabel independen: -pajak reklame -pajak penerangan jalan Variabel dependen: -pendapatan asli daerah	Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji f dan uji t	1. pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

			pendapatan asli daerah. 2. pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
Ervina Br Sembiring (2011)	Variabel independen: -pajak hotel -pajak reklame Variabel dependen: -pendapatan asli daerah	Model analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan analisis kontribusi uji asumsi klasik pengujian hipotesis.	1. secara parsial menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah namun pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 2. secara simultan pajak hotel dan pajak reklame bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
Mawar Dwi Putranty (2008)	Variabel independen: -pajak reklame -pajak restoran Variabel dependen:	Model analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik dan	1. secara parsial pajak restoran dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap

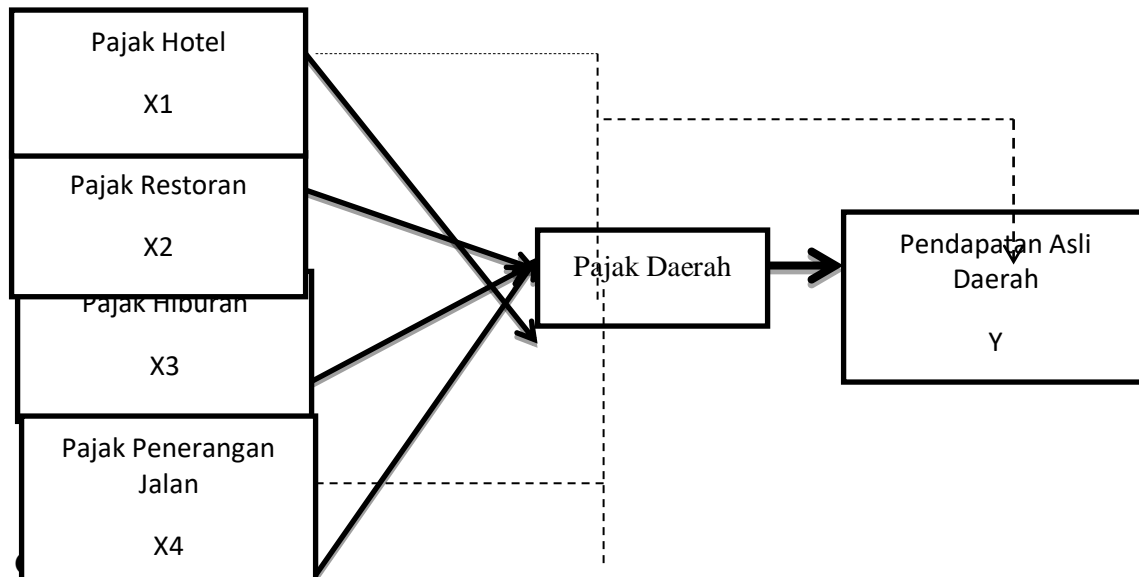
	Pendapatan asli daerah	pengujian hipotesis.	pendapatan asli daerah 2. secara simultan pajak restoran dan pajak reklame secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Putri Agustina (2014)	Variabel independen: -pajak daerah Variabel dependen: -pendapatan asli daerah	Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji f dan uji t.	1. secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah secara terpisah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
Ulfah (2007)	Variabel independen: -pajak reklame -pajak hotel Variabel dependen: -pendapatan asli daerah	Model analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis	1. secara parsial pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 2. secara simultan pajak reklame dan pajak hotel

			berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
--	--	--	---

B. Kerangka Pikir

Menurut Erlina (2011) kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pikir adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin di amati atau diukur melalui penelitian yang akan di lakukan

Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan, serta satu variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah. Kerangka pikir dapat di lihat pada gambar berikut ini:



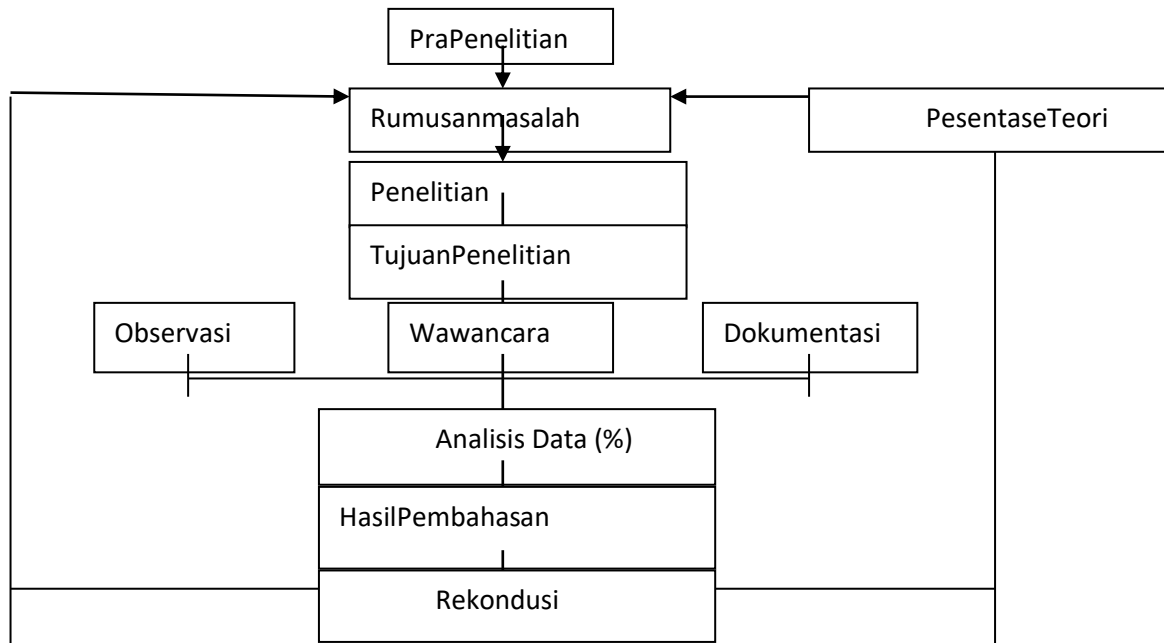
Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Arikunto (2002) adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai akar-akar kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya menurut Sucman, seperti yang dikutip oleh Nazir (2009). Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang dalam arti sempit hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja.

Skema desain penelitian.



B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian. Dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi homogen (keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifatnya relatif sama antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai ciri tidak terdapat perbedaan hasil tes dari jumlah tes populasi yang berbeda) dan populasi heterogen (keseluruhan individu anggota populasi relatif mempunyai sifat-sifat individu dan sifat ini yang membedakan antara individu anggota populasi yang satu dengan yang lain).

2. Sampel

Sampel merupakan proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terdapat terdapat sampel dan pemahaman tentang sifat dan karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Selain itu sampel dapat berupa responden yang di wawancara.

Teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Digunakan apabila representasi/keterwakilan sampel tidak penting.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket (Questionary) adalah pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan pada responden yang akan diteliti untuk diisi. Dalam hal ini kuesioner diserahkan secara langsung pada responden di lokasi penelitian.
2. Pengamatan (Observasi) adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung (participation) pada objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi.
3. Dokumentasi (Dokumentation) adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang didasarkan pada pencatatan dan pengamatan untuk membantu kelancaran dalam proses penulisan skripsi, misalnya struktur organisasi, tugas-tugas pegawai dan lain-lain.

D. Definisi Operasional

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ‘pendapatan asli daerah yang di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya di setiap daerah karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBN maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian bersumber dari laporan APBD, kabupaten sinjai terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dengan melakukan analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sinjai tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan rumusan kontribusi sebagai berikut

$$Pn = \frac{Qy}{Qx} \times 100\%$$

BAB I V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang kepala badan, kantor ini terletak di Jalan Bulu-Bulu Barat No 1 Kabupaten Sinjai. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi ialah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, namun tidak berarti bahwa semua penanganan urusan pemerintah harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.

Pemerintah kabupaten sinjai sebagai suatu organisasi memiliki fungsi memberikan suatu pelayanan kepada publik. Demi terlaksananya tugas tersebut diperlukan adanya peranan

kepemimpinan yang akan bertanggung jawab atas beban tugas yang telah dilimpahkan oleh organisasi dimana pimpinan tersebut bekerja.

Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekertaris
3. Bidang
4. Jabatan Fungsional Tertentu

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi:

1. Kepala Badan
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga dilingkungan badan pendapatan daerah.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pendapan daerah.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah.
2. Sekertaris Badan Penapatn Daerah
 - a. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan tugas badan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada ungsur dilingkungan badan serta menyiapkan rencan anggaran biaya operasional.
 - b. Menyelenggarakan distribusi dan monitoring surat masuk dan surat keluar di lingkungan badan pendapatan daerah.
 - c. Menyelenggarakan penyusunan dan penyiapan laporan keuangan, kepegawaian, dan investasi badan pendapatan daerah
3. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi meliputi surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, penyediaan alat-alat tulis kantor dan penyediaan fasilitas lainnya.
 - b. Menyusun rencna kerja program kegiatan sub bagian
 - c. Mengelola administrasi umum dan ketatalaksanaan
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Mencatat, mengelola, dan menganalisa data untuk bahan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - b. Menyusun rencana penerimaan pendapatan daerah
 - c. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja badan pendapatan daerah
5. Kepala Bidan Pendataan dan Penetapan
 - a. Menyelenggarakan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di pendataan dan penetapan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - c. Menyelenggarakan, menghimpun, mengelola dan memelihara basis data objek pajak daerah dan retribusi daerah
6. Kepala Sub Bidan Pendataan dan Pelayanan
 - a. Menyusun rencana kerja pendataan, pelayanan dan pengelolaan data informasi
 - b. Menyusun daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah
 - c. Mengelola pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
7. Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penilaian

- a. Menyusun rencana kerja penetapan dan penilaian
 - b. Melaksanakan perhitungan dan mempersiapkan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah
 - c. Memproses penerbitan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLN dan SKPDN
8. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi
- a. Menyusun rencana kerja sub bidang pemeriksaan pajak dan retribusi daerah
 - b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan
 - c. Melaksanakan pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran pajak oleh wajib pajak
9. Kepala Bidang Penagihan
- a. Menyelenggarakan pengumpulan bahan penyusunan rencana kegiatan di bidang penagihan
 - b. Merumuskan rencana kerja penagihan, penagihan, pengurangan, angsuran, serta penerimaan pendapatan lain-lain
 - c. Melaksanakan penagihan aktif pajak daerah dan retribusi daerah dimulai surat teguran sampai dengan penyitaan
10. Kepala Sub Bidang Penagihan
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang penagihan
 - b. Menyusun daftar tagihan piutan pajak daerah Dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo
 - c. Melaksanakan penerbitan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo
11. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang keberatan dan restitusi
 - b. Melaksanakan investarisasi permohonan keberatan, pengurangan, angsuran dan restitusi serta permohonan lainnya terkait hak wajib pajak dan retribusi daerah
 - c. Mempersiapkan kajian dan penelitian atas permohonan keberatan, pengurang, angsuran dan restitusi serta pengurangan lainnya terkait hak wajib pajak dan retribusi daerah
12. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- a. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan tentang penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya
 - b. Melaksanakan perhitungan dan pembukuan tunggakan/ piutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
 - c. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah dengan bendahara umum daerah, bendahara penerimaan dan instansi terkait
13. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
- a. Menyusun rencana kerja tata kelola dan retribusi pasar, pembinaan dan pengembangan pasar serta kebersihan dan ketertiban pasar
 - b. Menyelenggarakan pelaksanaan tata kelola penempatan pedagang atas bangunan pasar
 - c. Menyelenggarakan pemungutan retribusi kekayaan daerah dilokasi pasar
14. Kepala Sub Bidang Penerimaan Retribusi
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang penerimaan retribusi pasar
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginvestarisan permasalahan perizinan dan penagihan retribusi
 - c. Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar

15. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar
- b. Mendistribusikan fasilitas sarana dan prasarana pasar
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginvestarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan pasar

16. Kepala Sub Bidang Kebersihan dan Ketertiban Pasar

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang kebersihan dan ketertiban pasar
- b. Menyelenggarakan kebersihan pasar, bangunan pasar, dan fasilitas lainnya di lingkup pasar
- c. Melaksanakan penyuluhan pada para pedagang untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pasar

1. Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sinjai

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang berbeda di wilayah kabupaten sinjai. Hotel yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Penerimaan pajak hotel kabupaten sinjai tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Sinjai Tahun 2010-2018.

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	500.000.000	240.431.000	48%
2015	500.000.000	276.126.000	55%
2016	300.000.000	453.313.319	151%
2017	300.000.000	438.791.800	146%
2018	450.000.000	357.371.700	79%
Jumlah	2.050.000.000	1.249.993.376	479%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

2. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sinjai

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang berada di wilayah kabupaten sinjai. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kanting, warung, dan sejenisnya termasuk jasa catering. Penerimaan pajak restoran kabupaten sinjai tahun 2010-2018 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018.

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	750.000.000	400.696.538	53%
2015	750.000.000	385.434.569	51%
2016	400.000.000	538.938.288	135%
2017	350.000.000	606.270.879	173%
2018	370.000.000	675.503.830	183%
Jumlah	2.620.000.000	2.606.844.104	595%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

3. Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Sinjai

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang berada di wilayah kabupaten sinjai. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penerimaan pajak hiburan kabupaten sinjai tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel dibawa ini:

Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	100.000.000	2.530.000	3%
2015	50.000.000	400.000	1%
2016	10.000.000	5.550.000	56%
2017	3.000.000	3.850.000	128%
2018	4.000.000	2.500.000	63%
Jumlah	167.000.000	14.830.000	251%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sinjai.

4. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sinjai

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan lain, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten sinjai tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel dibawa ini:

Tabel 1.4 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	1.230.000.000	1.287.226.417	105%
2015	1.230.000.000	1.575.982.190	128%
2016	1.500.000.000	1.699.824.429	113%
2017	1.700.000.000	1.700.922.148	100%
2018	1.700.000.000	1.866.219.445	110%
Jumlah	7.360.000.000	8.130.174.629	556%

Sumbr: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjia

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten sinjai tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel dibawa ini:

Tabel 1.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018.

Tahun	Target	Realisasi
2014	2.580.000.000	1.930.883.955
2015	2.530.000.000	2.237.942.759
2016	2.210.000.000	2.697.626.039

2017	2.353.000.000	2.745.988.677
2018	2.524.000.000	2.899.097.475
Jumlah	9.987.000.000	12.511.538.475

Dari laporan di atas realisasi pendapatan asli daerah tahun 2014 maka dapat dianalisis sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{1.930.883.955}{12.551.538.887} \times 100 \% \\ &= 15,43 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 15,43%

Dari laporan di atas realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015 maka dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{2.237.942.759}{12.551.538.887} \times 100 \% \\ &= 17,83 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2015 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 17,83%

Dari laporan di atas realisasi pendapatan asli daerah tahun 2016 maka dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{2.697.626.039}{12.551.538.887} \times 100 \% \\ &= 21,49 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 21,49%

Dari laporan di atas realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017 maka dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.745.988.677}{12.551.538.887} \times 100 \%$$

$$= 21,87 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2017 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 21,87%.

Dari laporan di atas realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018 maka dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.899.097.475}{12.551.538.887} \times 100 \%$$

$$= 23,09 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak daerah pada tahun 2018 memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 23,09%.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat dirinci kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 15,43%.
2. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar 17,83%.
3. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sebesar 21,49%.
4. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017 sebesar 21,87%.
5. Nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sebesar 23,09%.

Tabel 1.6 Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Tahun	Nilai kontribusi pajak daerah	Keterangan
-------	-------------------------------	------------

2014	15,43%.	-
2015	17,83%.	Meningkat
2016	21,49%.	Meningkat
2017	21,87%.	Meningkat
2018	23,09%.	Meningkat

Dilihat dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahun 2015 terjadi kenaikan nilai kontribusi pajak daerah, hal ini disebabkan karena kontribusi pajak daerah sudah baik sehingga harus dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan, dengan cara memperbaiki system pemungutan pajak dan potensi daerah yang ada agar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah semakin besar.
- b. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 terus meningkat nilai kontribusi pajak daerah, hal ini disebabkan karena proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya sangat memperhatikan potensi yang ada sehingga sehingga pemungutan pajak daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

B. Pembahasan

1. Tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajakdaerah.

Dari table 1 dapat dilihat bahwa rasio efektifitas pemungutan pajak daerah di kabupaten sinjai tahun anggaran 2014-2018 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 penerimaan pajak daerah untuk jenis pajak hotel sudah mencapai lebih dari 100% akan tetapi masi banyak pajak-pajak lain yang belum mencapai target.

Dari table 2 dapat dilihat bahwa rasio efektifitas pemungutan pajak daerah di kabupaten sinjai tahun anggaran 2014-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 penerimaan pajak daerah untuk jenis pajak restotran sudah mencapai lebih dari 100%

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa rasio efektifitas pemungutan pajak daerah pada tahun anggaran 2014-2018 mengalami [eningkatan dan mengalami penurunan dan hanya pada tahun 2017 penerimaan pajak hiburan yang sudah mencapai dari 100%

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa ektifitas pemungutan pajak daerah di kabupaten sinjai tahun anggaran 2014-2018 mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018 penerimaan pajak daerah untuk jenis pajak penerangan jalan sudah mencapai dari 100%

2. Tingkat pencapain realisasi penerimaan pendaptan asli daerah

Dari tabel 5 dapat kita lihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai tahun anggaran 2014-2018 mengalami peningkatkan, realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa selama 5 tahun anggaran (2014-2018) pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah telah efektif, karena kontribusi yang telah d berikan terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2014 realisasi pendapatan asli daerah kabupaten sinjai sebesar 1.930.883.955.yang berarti bahwa menunjukkan kinerja yang baik pemungutan pajak atau pendapatan asli daerah ini berasal dari komponen-komponen pendapatan daerah yang terealisasi

yang sesuai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan walaupun masih ada yang belum mencapai.

Pada tahun 2015 realisasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 2.237.942.759. hal ini menunjukkan atas meningkatnya kinerja pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah dari masing-masing komponennya.

Pada tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah kabupaten sinjai sebesar 2.697.626.039. pada tahun ini juga mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah sebesar 2.745.988.677. dapat dilihat dari tahun sebelumnya realisasi pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan karena pemerintah daerah dan masyarakat sudah aktif dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah sebesar 2.899.097.475 dari tahun ini pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah dan pemungutan pajak daerah di kabupaten sinjai sudah efektif.

3. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Dari seluruh tabel di atas kita dapat membandingkan sumber pendapatan asli daerah seperti retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah maupun pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah setiap tahunnya selalu memiliki peran atau kontribusi yang kedua terbesar dalam pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2014 kontribusi pajak daerah untuk tahun 2014 yaitu sebesar 15,43%. Pada tahun ini realisasi pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah sudah mencapai target karena disebabkan oleh berbagai faktor yaitu adanya tambahan-tambahan penginapan, wisma atau hotel di kabupaten sinjai jadi pajak daerah pada tahun 2014 mulai mencapai target.

Pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 6 bahwa adanya peningkatan untuk tahun 2015, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 17,83% . pada tahun ini sudah sangat jelas bahwa adanya peningkatan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dikarenakan pada tahun ini masyarakat kabupaten sinjai mulai membangun tempat-tempat makan seperti: café, warkop dan restoran. Dapat kita lihat di kota sinjai sepanjang jalan terdiri begitu banyak tempat sejenis restoran jadi pemungutan pajak akan semakin bertambah dan mengalami peningkatan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai,

Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah untuk tahun 2016 yaitu sebesar 21,49% pada tahun ini terjadi lagi peningkatan dari tahun sebelumnya karena disebabkan berbagai faktor yaitu di tahun-tahun sebelumnya terlihat bahwa di kabupaten sinjai ini tidak ada yang namanya tempat hiburan atau tempat karaoke dan di awal tahun 2016 masyarakat yang ada di desa lappa mendirikan beberapa tempat karaoke pinggiran yang di sebut muara galau terlihat disitu tempat karaoke yang hanya di pinggir jalan dan terbuka, tetapi sangat banyak dikunjungi oleh orang-orang bahkan setiap malam tempat itu selalu ramai. Di awal inilah mulai terjadi pembangunan tempat karaoke di kabupaten sinjai yang sejenis tempat-tempat karaoke yang ada di kota lain jadi sangat jelas bahwa setiap tahun terjadi pembangunan-pembangunan yang akan meningkatkan pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai.

Pada tahun 2017 kontribusi pajak daerah untuk tahun 2017 yaitu sebesar 21,87% pada tahun ini terjadi lagi peningkatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah dikarenakan di tahun ini terjadi pembentukan atau penambahan listrik ke desa-desa yang ada di kabupaten sinjai tepatnya desa yang saya tinggali yaitu desa desa lammatti riawang, kecamatan bulupoddo,

kabupaten sinjai di tahun 2017 ini baru terjadi pembentukan tiang listrik dan penerangan jalan jadi pada tahun ini sudah benar bahwa adanya peningkatan pemungutan pajak karena terjadi penambahan pajak penerangan ke desa-desa yang ada yang ada di kabupaten sinjai.

Kontribusi pajak daerah selama waktu kurang 5 tahun anggaran mengalami peningkatan yaitu dapat kita lihat pada tabel 6. Pada tahun 2014 nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 15,43%, dan mengalami peningkatan 23,09% pada tahun 2018, hal ini disebabkan pajak daerah yang sesuai dengan targetnya yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Ke 4 pajak ini sangat mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai

4. Hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah masih mengalami beberapa hambatan. Namun dilihat dari persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang selama 5 tahun (2014-2018) tidak mengalami penurunan namun terjadi juga hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak daerah di kabupaten sinjai adalah sebagai berikut.

- a. Kurangnya informasi, komunikasi dan sosialisasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan sehingga sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah itu sendiri
- b. Masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak namun tidak ada tindakan atau sanksi yang tegas dan rumus hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan
- c. Pelayanan ataupun prosedur administrasi perpajakan daerah yang kurang efektif menyebabkan masyarakat pembayar pajak merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak sehingga masyarakat tidak patuh dalam pembayaran pajak

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak daerah dapat di tanggulangi dengan upaya-upaya yang dilakukan antara lain.

- a. Diadakan penyuluhan atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang manfaat membayar pajak
- b. Pemerintah daerah perlu meneliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme reward and punishment
- c. Pemerintah daerah perlu melakukan penyerderhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
- d. Melakukan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan informasi terhadap jenis-jenis pajak yang memungkinkan untuk dikembangkan
- e. Melakukan intensifikasi yaitu dengan cara:
 1. Mengadakan pendekatan persuasive kepada wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan
 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan pelaksanaan pemungutan pajak
 3. Membentuk tim satuan tugas yang bertugas untuk mengawasi pemungutan yang ada di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah.
3. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai pada tahun 2014 sebesar 15,43%., tahun 2015 17,83%., tahun 2016 sebesar 21,49%., tahun 2017 sebesar 21,87%., tahun 2018 sebesar 23,09%. Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah tetap meningkat tiap tahun selama tahun 2014-2018 penerimaan pajak daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan peran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup besar
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yaitu:
 - a) Kurangnya informasi, komunikasi dan sosialisasi tentang pajak daerah kepada masyarakat
 - b) Masih banyak masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada tindakan sanksi yang tegas
 - c) Pelayanan ataupun prosedur administrasi perpajakan daerah yang kurang efektif

B. Saran

Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran dan masukan bagi peneliti selanjutnya dan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah.

1. Menjadikan tingkat pertumbuhan realisasi pemungutan pajak daerah sebagai sebuah ukuran untuk menilai kinerja sehingga tidak hanya target APBD saja yang menjadi perhatian
2. Meningkatkan efektifitas pendataan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD dengan cara observasi lapangan berkala.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka cara berfikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di kabupaten sinjai sehingga mereka tergugah untuk taat pajak.
4. Penulis menyarankan agar tidak menggunakan hasil penelitian ini sebagai satu-satunya alat analisis untuk meningkatkan penerimaan daerah serta pendapatan asli daerah bagi badan pendapatan daerah kabupaten sinjai
5. Bagi pemerintah pusat, sebagai gambaran terhadap pemerintah pusat untuk melihat bagaimana suatu pemerintah daerah meningkatkan sumber pemasukan pendapatan asli daerah dan mengembangkan sumber-sumber potensi di daerah tersebut.
6. Sebaiknya untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah, pemerintah kabupaten sinjai diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari masing-masing jenis pajak daerah yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah supaya

persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak mengalami penurunan pada tahun selanjutnya tetapi akan semakin meningkat tiap tahunnya.

Penulis telah berusaha membuat skripsi ini sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan penulis namun masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang lebih banyak lagi

DARTAR PUSTAKA

- Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M. (2010). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Safuridar, S. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. (Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi).
- Yeyen Royani Anwar, (2012). Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau. Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
- Arsy, Lusy Noor, 2013. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung). Skripsi Universitas Widyatma.
- Christine, Maria, 2015. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Periode 2010-2014. Skripsi, Universitas Kristen Maranatha. Bandung.
- Helvianti, 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan kabupaten Rokan Hilir-riau. Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Koswara. 2000. Otonomi dan Pajak Daerah. Jogjakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marpaung, Junior Norris, 2009. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan, Yogyakarta
- Oktoriani, Arintina Devi, Rina Purwaningsih Istianah, 2013. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Brebes. Jurnal Vol 12, No 2. Politeknik Tegal.
- Mustaqim, 2008. Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, Yogyakarta FH UII Press.
- Putranty, Mawar Dwi. 2008. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan asli Daerah (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II). Skripsi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Keteentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sembiring, Ervina. 2011. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan. 2010. Hukum Pajak Parlementer. Yogyakarta

Ulfa. 2007. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Hotel Terhadap PAD pada Propinsi DKI Jakarta. Skripsi Akuntansi Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Jakarta.